

Reformasi Birokrasi Indonesia: Mencari Format Implementasi Kebijakan dalam Krisis Paradigma Administrasi Negara

Kuliah Pembekalan

Dosen Pasca-Sarjana

STIA-LAN Bandung, 30 Juni 2015

Wahyudi Kumorotomo, PhD

Magister Administrasi Publik

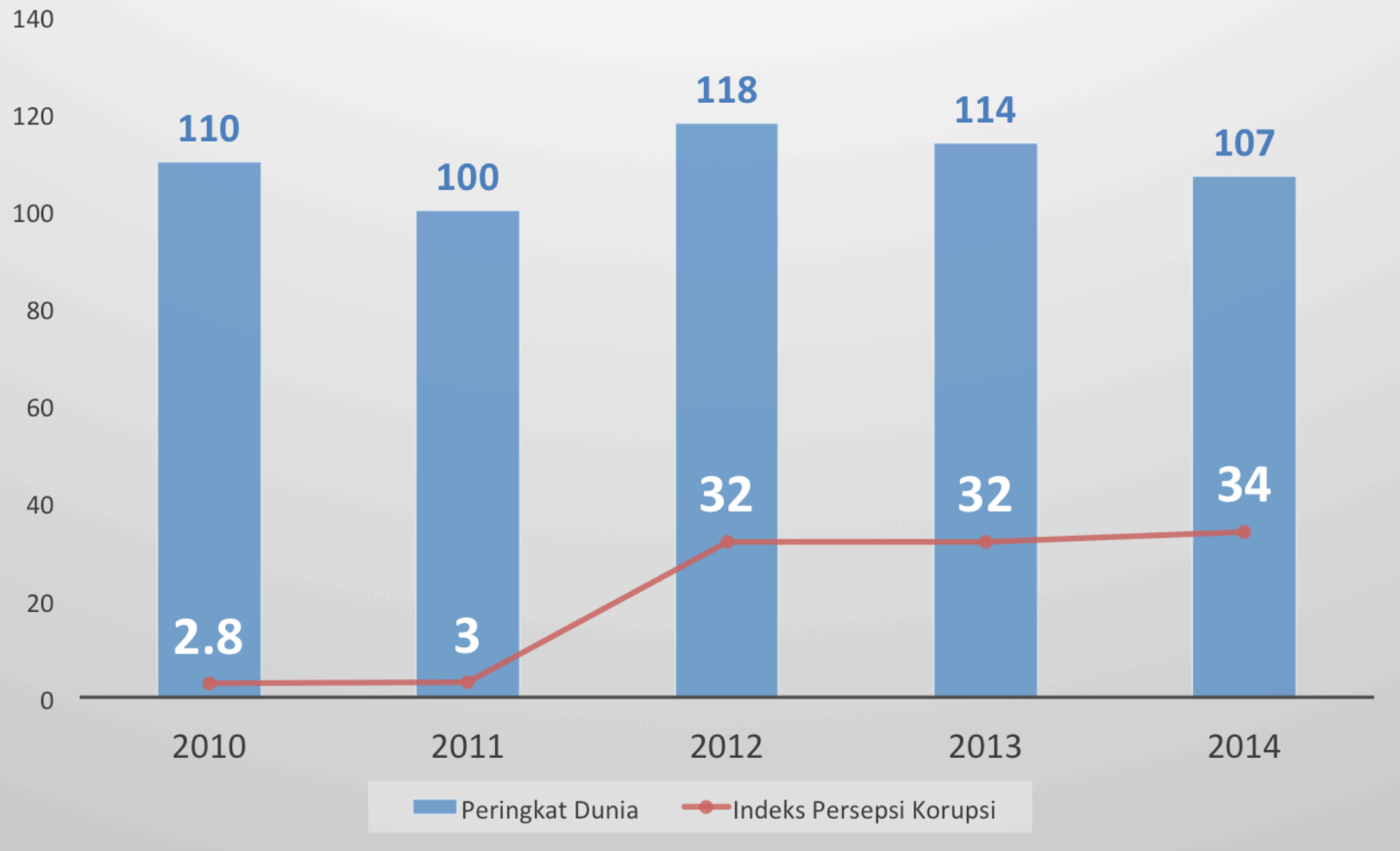
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Agenda Paparan

1. Masalah Reformasi Birokrasi di Indonesia
2. Tantangan Implementasi Grand-Design RB
3. Krisis Paradigma Administrasi Negara:
Neo-Weberian vs New Public Management
4. Format Implementasi RB dalam Pencarian
Paradigma Baru
5. Tantangan ilmuwan Administrasi Negara
Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir



*) mulai tahun 2012 skor indeks persepsi korupsi berubah dari skala 1-10 menjadi 1 -100

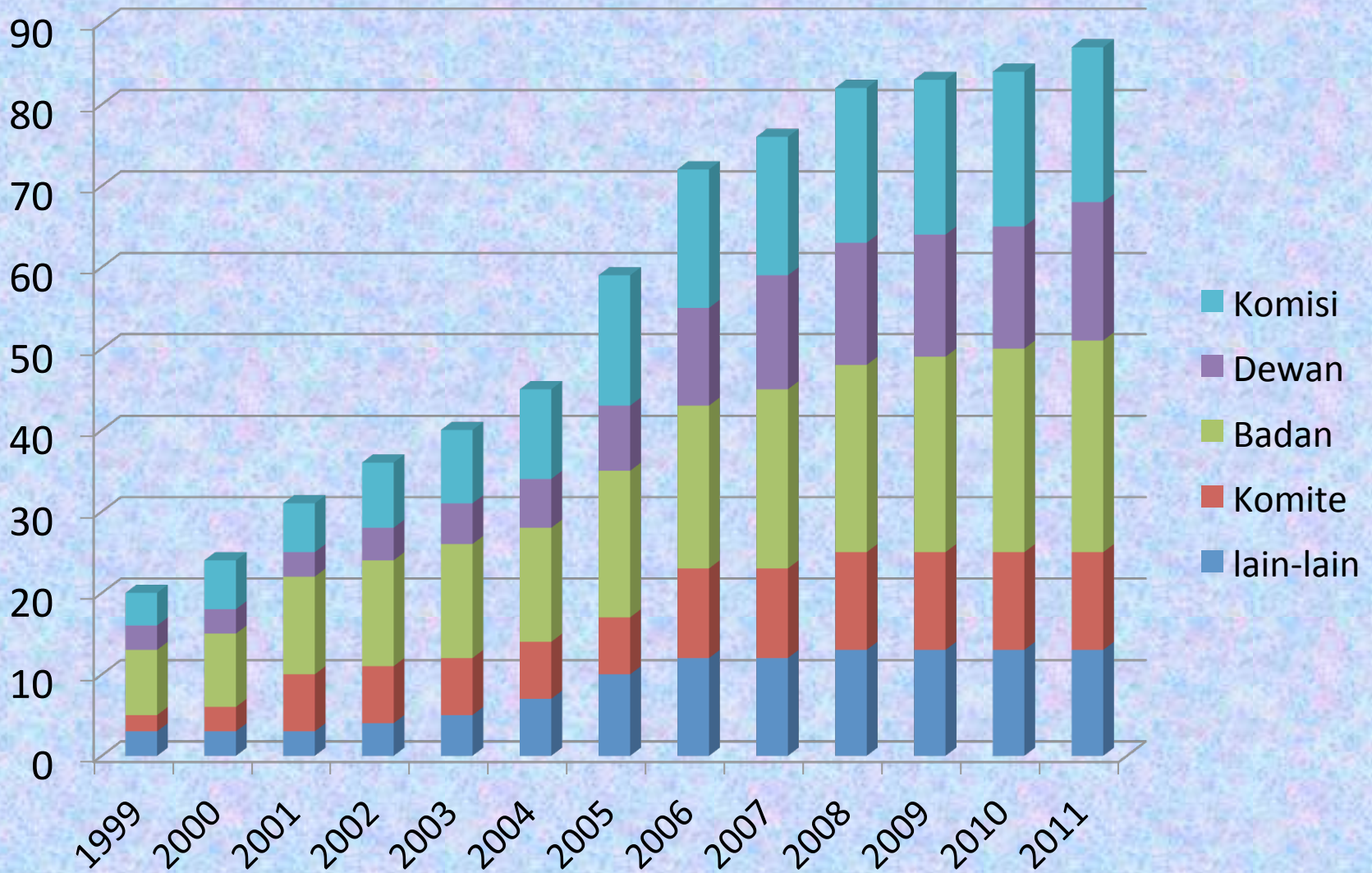
Sumber: Transparency International

Kabinet dan Lembaga Kerja di Beberapa Negara

Negara	Kementerian	LPNK	IB/LNS	GDP Perkapita US \$
Australia	37	NA	NA	40.800
China (RRC)	22	NA	NA	8.500
Jepang	11	19	13	35.200
Indonesia	34	28	88	4.700
Korea Selatan	15	19	13	32.100
Perancis	31	NA	NA	33.509

Sumber : Kemenpan dan RB 2012

Terbentuknya Lembaga Negara Mandiri Selama Satu Dasawarsa



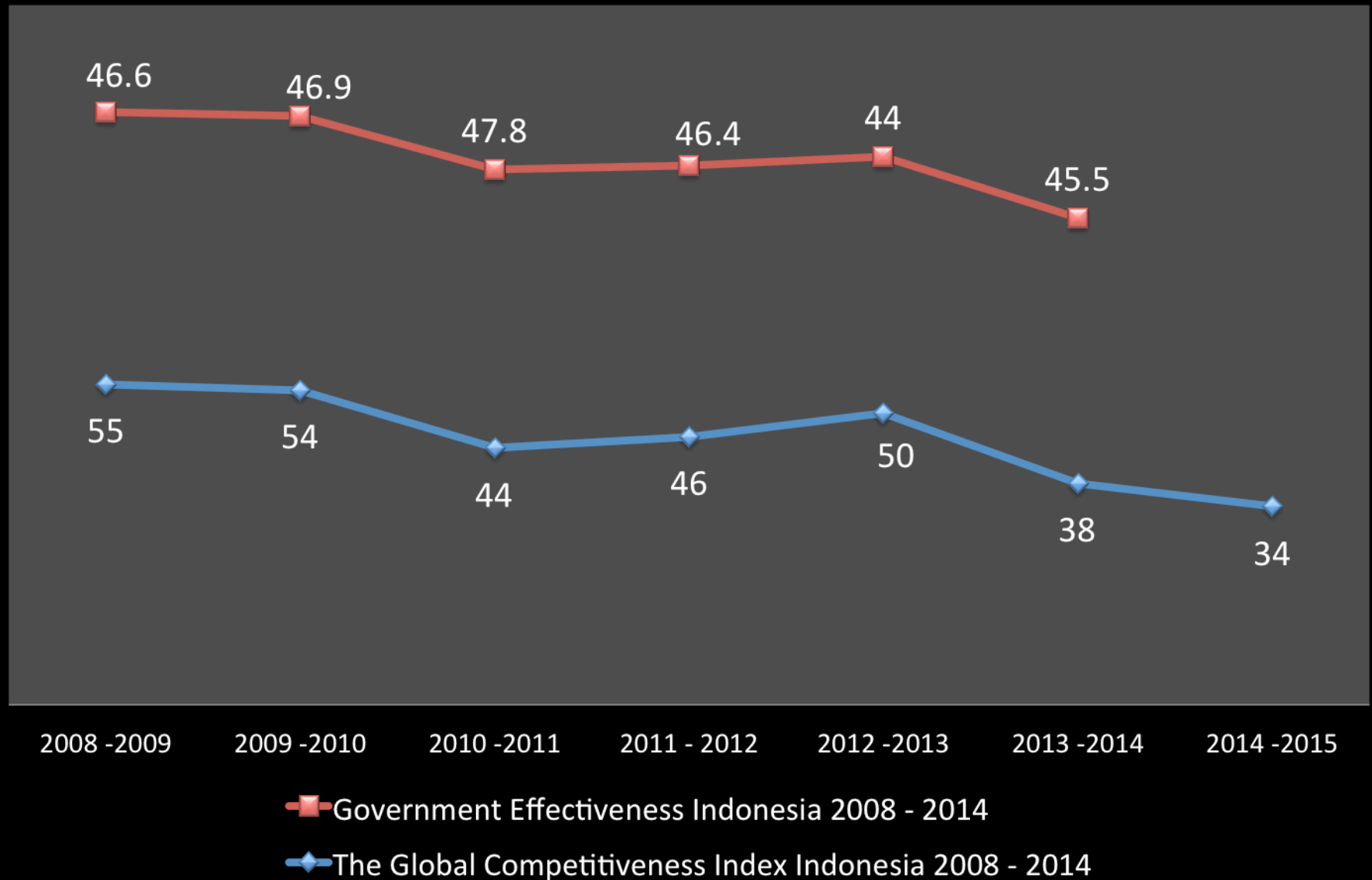
Sumber : Kemenpan dan RB 2012

Indikator Capaian RB

Target	Indikator	2009 Baseline	2010	2011	2012	2013	2014	Target 2014	
Birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Indeks Persepsi Korupsi*	2,8	2,8	3,0	32	32	34	50	
	Opini BPK (WTP) (%)	Pusat	42,17	56	63	77	74	76	100
		Daerah	2,73	3	9	16	27	35	60
Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Integritas	Pusat	6,64	6,2	7,1	6,86	7,37	7,22	8,0
	Pelayanan Publik	Daerah	6,46	5,3	6,0	6,3	6,82	n.a.	8,0
	Peringkat Kemudahan Berusaha		122	121	129	116	120	114	75
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Efektivitas Pemerintahan	- 0,29	-0,20	-0,25	-0,29	n.a.	n.a.	0,5	
	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (%)	Pusat	47,40	63,3	82,9	95,1	94,05	98,76	100
		Provinsi	3,8	31	63,3	75,8	84,85	87,88	80
		Kab/Kota	5,1	8,8	12,8	24,4	30,3	44,90	60











*) mulai tahun 2012 skor indeks persepsi korupsi berubah dari skala 1-10 menjadi 1 -100

Grafik Peringkat Indonesia di dunia 10 tahun terakhir



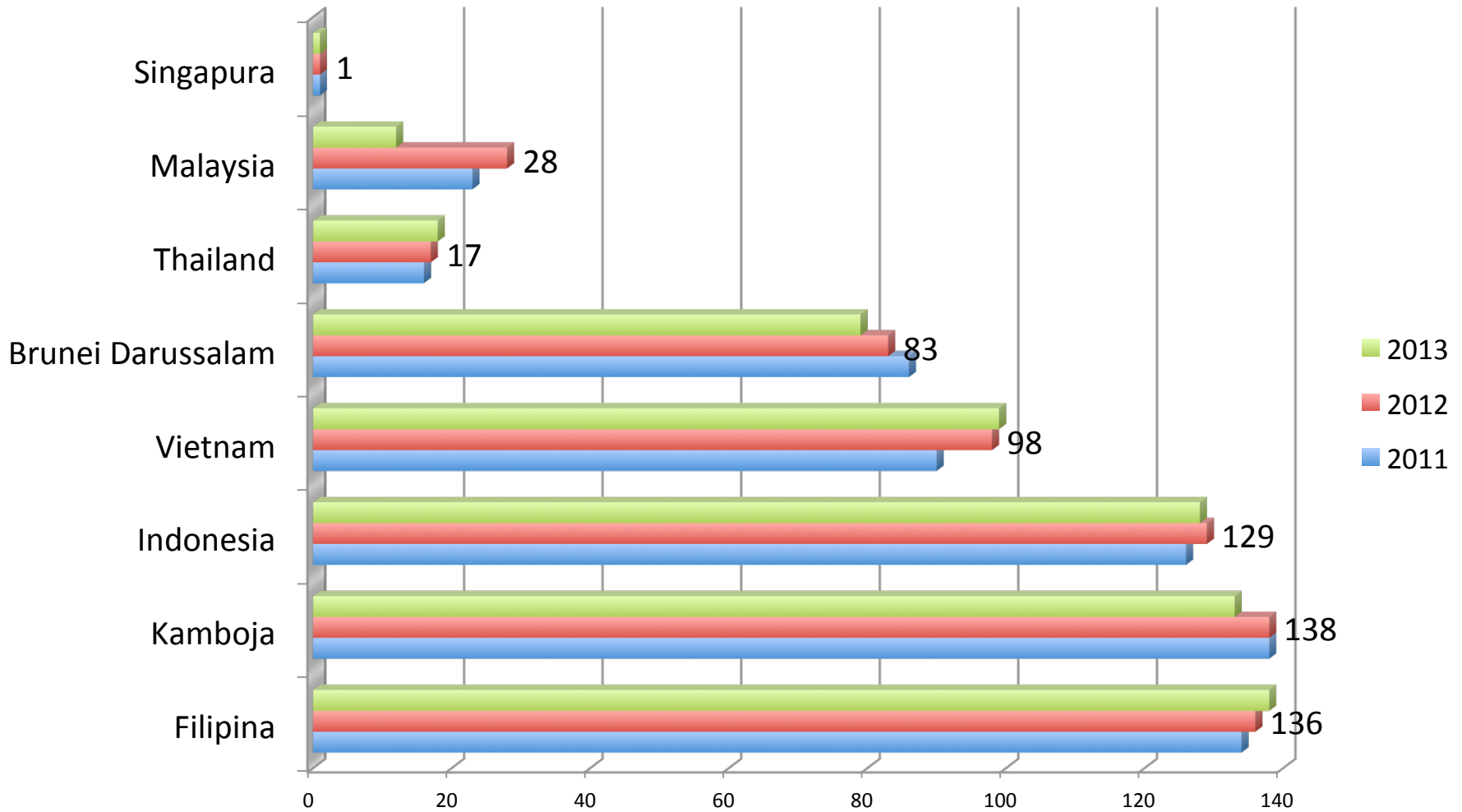
Sumber: diolah dari Worldwide Governance Indicators (WGI)

Doing Business Ranking: Indonesia *)

Topics	2013 Rank	2012 Rank	Change in Rank
Starting a business	166	161	 -5
Dealing with construction permits	75	72	 -3
Getting electricity	147	158	 11
Registering property	98	99	 1
Getting credit	129	127	 -2
Protecting investors	49	46	 -3
Paying taxes	131	129	 -2
Trading across borders	37	40	 3
Enforcing contracts	144	145	 1
Resolving insolvency	148	149	 1

*) Peringkat dari 185 negara. Sumber: www.doingbusiness.org

Business Climate Ranking



8 Program Akselerasi Menpan & RB

Manajemen dan Organisasi

Distribusi Layanan Publik yg Berkualitas

Profesionalisasi Layanan Publik

E-Government

Deregulasi Perijinan dan Debirokratisasi

Sistem Pelaporan Aset dan Kekayaan Negara

Sistem Remunerasi

Efisiensi Lembaga Pemerintah

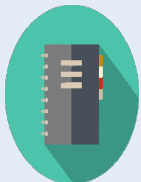
CATATAN KELEMAHAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA



Penekanan berlebihan pada kebijakan remunerasi. Sebelum pelaksanaan GDRB, belanja pegawai mencapai Rp 127 triliun pada tahun 2009 dan setelah pelaksanaan kebijakan RB (remunerasi baru) belanja pegawai menjadi Rp 263 triliun tahun 2014



Terjadi formalisme proses RB yang berlebihan, sehingga RB cenderung membebani pekerjaan internal birokrasi karena tuntutan *paperwork* terkait dengan kelengkapan dokumen meningkat.



Delapan area perubahan yang dilakukan K/L sering tidak sesuai dengan substansi perencanaan yang sedang berjalan. Kegiatan reformasi birokrasi bukan menjadi bagian integral dari penganggaran kegiatan seperti yang tercantum di dokumen perencanaan. Kegiatan-kegiatan RB pada gilirannya dipahami sebagai beban tambahan

Government 1.0 Government 2.0 Government 3.0



Penguasa

- Ingin dilayani
- Berjarak dengan masalah
- Pelayanan berbasis kecurigaan- red tape

Citizen Oriented

- Greater democracy
- Hubungan bersifat dialogis dengan masyarakat

Dynamics Governance'

- Hubungan bersifat personalized
- Individual happiness

Ruled-Based Bureaucracy (2010-2014)



Performance-based Bureaucracy (2015-2019)



Dynamic Governance (2020-2024)



Ruled-based

- Rule-driven
- Penyeragaman Peraturan

Performance based

- Orientasi pada kinerja
- Penilaian-monitoring evaluasi secara ilmiah
- Bersifat Antisipatif ketimbang reaktif

Dynamics Governance'

- Hubungan bersifat personalized
- Individual happiness

Birokrasi Weberian

(Wirtschaft und Gesellschaft, 1922)

1. Rasionalitas dlm organisasi pemerintah
2. Sistem hierarkhi
3. Sistem merit (impersonalitas)
4. Pembagian tugas secara ketat
5. Pengembangan karir menurut prestasi
6. Rasionalitas akan meningkatkan kecepatan, *scope*, prediktabilitas, dan cost-effectiveness.

Patologi Birokrasi, Kegagalan Birokrasi Weberian (Dwiyanto, 2015)

1. Paternalistik → Asal Bapak Senang
2. Pembengkakan anggaran
3. Prosedur yg berlebihan
4. Proliferasi, pembengkakan birokrasi
5. Fragmentasi → sulit melakukan koordinasi kebijakan.

NPM (New Public Management)

Christopher Hood, 1991

→ Gagasan pokok: penerapan prinsip & teknik manajemen bisnis dari swasta ke sektor publik

1. Konsep neo-liberal tentang negara dan ekonomi
2. Standarisasi, kuantifikasi (*hard data*)
3. Tujuan: meminimalkan peran negara, alih-daya (*out-sourcing*)
4. Prinsip pokok: efisiensi
5. Warga sebagai pelanggan (*customer*).

Kegagalan NPM

(Wolfgang Drechsler, 2015)

1. Definisi efisiensi utk sektor publik yg salah
 2. Kegagalan pasar & swastanisasi
 3. Tidak menggunakan teori ekonomi yg sesungguhnya
 4. Pandangan ttg warga sebagai “manusia” kurang spesifik
 5. Warga negara sebenarnya bukan pelanggan (*customer*).
- Keyakinan NPM bhw manusia selalu didorong oleh gaji yg tinggi tidak selalu berlaku.
- Pd akhir abad ke-20 dan th 2008, NPM mengakibatkan krisis.

Terobosan UU No.5/2014 ttg ASN

1. Pemisahan yg jelas pegawai “honorer” (skrg PPPK) dg PNS. PPPK tdk otomatis menjadi PNS; bagi PNS berlaku evaluasi sistematis.
2. Pengembangan karir lebih jelas. Tiga kategori: JPT, jabatan fungsional, jabatan administrasi; Karir tidak tergantung pangkat & jabatan, tetapi kompetensi.
3. Kelembagaan manajemen SDM: Kemenpan & RB, Kemdagri, LAN, BKN. KASN sbg “*Civil Service Commission*” tingkat nasional.
4. PNS adalah profesi. Semestinya tidak ada lagi intervensi politik dalam rekrutmen dan promosi PNS (?)
5. Efektivitas tergantung pelaksanaannya. Agenda: pembentukan KASN (6 bln), 17 PP (2 th).

Implementasi RB Tanpa Paradigma Baru (?)

Christopher Politt & Geert Boukhaert (President IAAS) dlm buku *Public Management Reform* (2012):

“They did not fully implement the NPM. What we need is a basically Weberian system or model with the good NPM we could learned”.

Bagaimana format campuran antara Neo-Weberian dengan NPM? *Whole government approach?*

Tantangan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia

1. Membumikan kontribusi ilmu administrasi negara ke dalam masalah riil bangsa: Reformasi Birokrasi
2. Rencana pemerintah untuk RB sudah banyak (Prioritas #1 pada RPJMN sejak 2004, Grand-design RB 2015-2019, Nawacita: “menolak negara lemah”), yang masih kurang adalah implementasinya.
3. Mendorong pengembangan teori secara mandiri karena teori universal yang baru belum ada.
4. Mengembangkan program pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM aparatur dan inovasi layanan publik.

TERIMA KASIH